

PR Besar Aceh Mengurus Vaksinasi



Maulana Arya Jimbaran, Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Malikussaleh

Oleh Maulana Arya Jimbaran

Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh

Melalui Pandemi Covid-19, kita disadarkan betapa berharganya vaksin di dalam kehidupan manusia. Dengan tahapan dan pengujian yang panjang serta biaya yang tidak murah, *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) memperkirakan butuh waktu paling cepat 12 bulan untuk membuat vaksin Covid-19 yang aman dan efektif.

Vaksin diburu karena memang prestasi vaksin tidak diragukan lagi. Sejarah mencatat vaksin pernah berhasil mengakhiri wabah *smallpox*, penyakit cacar mematikan disebabkan oleh virus yang menewaskan 300 juta orang di abad ke-20. Melalui vaksinasi massal di seluruh dunia, pada tahun 1980 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan bahwa *smallpox* berhasil dieradikasi, alias nol kasus, tidak ada lagi kasus baru.

Kini dunia sedang berlomba membuat vaksin Covid-19. WHO mendata (22/05) terdapat sekitar 114 kandidat vaksin Covid-19 sedang dalam tahap uji preklinis dan 10 kandidat vaksin yang sudah masuk ke tahap uji klinis. Semuanya masih dalam tahap penelitian.

Ketika vaksin Covid-19 berhasil dibuat, mungkin kita membayangkan bahwa nasibnya akan mengikut *smallpox*, diadakan vaksinasi massal kemudian Covid-19 berhasil dihilangkan. Padahal kenyataannya tidak semulus itu. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Kegawatdaruratan Kesehatan WHO, Dr Michael Ryan dalam konferensi pers (13/05), bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi setelah vaksin dibuat adalah memastikan orang bersedia divaksin.

Vaksin bukan lagi barang baru. Sudah banyak penyakit yang berhasil dibuatkan vaksin. Namun hingga kini belum ada satu pun penyakit selain *smallpox* dan *rinderpest* (penyakit pada sapi), yang berhasil dieradikasi. Salah satunya karena makin bertambahnya jumlah orang yang menolak vaksinasi. Kampanye-kampanye aktivis anti-vaksin dan teori konspirasi kian merajalela. Terjadi penolakan vaksinasi yang berdampak semakin jauhnya kita dari target untuk mencapai eliminasi (penekanan angka kejadian penyakit menular serendah mungkin), apalagi eradikasi (nol kasus).

PR Besar Provinsi Aceh

Data dari Kemenkes RI, dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018, Provinsi Aceh merupakan provinsi terendah ke-2 se-Indonesia untuk cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, 39,45% dan terendah untuk cakupan Imunisasi Campak, yaitu 44% (Target 95%). PR besar bagi Aceh untuk menuntaskan persoalan ini. Jika dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan di Aceh akan muncul wabah penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi.

Jika dicermati, ada beberapa pokok persoalan yang menghambat vaksinasi di Aceh. Masalah-masalah ini seharusnya sudah harus segera diselesaikan untuk mencegah timbul permasalahan khususnya di bidang kesehatan.

Halal-Haram Vaksin

Isu vaksin mengandung lemak babi menguat ke publik sejak diadakan Imunisasi MR (Measles/Campak dan Rubella) di seluruh Indonesia tahun 2018 kemarin. Program Kemenkes tersebut sempat terhenti karena ramainya penolakan dari masyarakat. Atas ajuan Menkes, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa (No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi) yang menyatakan bahwa vaksin tersebut adalah haram, karena dalam pembuatannya memanfaatkan bahan dari babi. Namun yang sering kali tidak tersampaikan ke masyarakat adalah juga tercantum dalam fatwa, hukum penggunaan vaksin MR saat ini adalah *mubah* (dibolehkan), mempertimbangkan kondisi darurat dan belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Informasi ini yang seharusnya juga sampai ke masyarakat. Tidak karena haram lalu ditolak begitu saja, karena ada banyak hal yang turut menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum ini.

Tanggal: 16 June 2020

Post by: [riyandhi](#)

Kategori: [Repository Media](#),

Tags: [Unimal](#), [Kedokteran Unimal](#), [KKN](#),